

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah kemiskinan muncul jika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sesungguhnya, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kekurangannya pendapatan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (Azizah dkk, 2018).

Adapun 14 Kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2014) adalah luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah (bisa diganti dengan bambu atau kayu murahan), jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu (bisa diganti dengan rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester), tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur (mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan), bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar (bisa arang maupun minyak tanah), hanya mengkonsumsi daging (bisa susu atau ayam satu kali dalam seminggu), hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, hanya sanggup makan sebanyak

satu atau dua kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha buruh tani atau nelayan atau buruh bangunan atau buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan (2005), pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yang tidak sekolah adalah tidak tamat SD atau hanya SD (Sekolah Dasar), tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 (seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya). Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.

Menurut Kuncoro dalam Anindita (2017) garis kemiskinan adalah semua ukuran kemiskinan yang dipertimbangkan berdasarkan norma-norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu : (1) pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari total penduduk Sidoarjo sejumlah 2,15 juta jiwa pada tahun 2016, sebanyak 6,39 persen nya merupakan penduduk yang berada pada garis kemiskinan (miskin/sangat miskin). Dibanding 5 tahun sebelumnya, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Sejalan dengan itu, tingkat kesenjangan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga terus menurun. Hal ini bisa dilihat dari besaran Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sidoarjo yang berada pada nilai indeks terendah diantara daerah lain di Jatim (selain kota), sejak 3 tahun terakhir.

Angka kemiskinan di Kab Sidoarjo, menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) dari Kantor Wakil Presiden adalah yang paling rendah di Jawa Timur. Tercatat per data tahun 2018, angka kemiskinan di Sidoarjo 5.6% (Dari yang semula 2017 sebesar 6,23 persen atau sebanyak 135.420 orang, tahun lalu turun menjadi 5,69 persen atau 125.750 orang yang artinya, angka kemiskinan turun sebanyak 0,54 persen dalam setahun). Angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo adalah yang paling rendah di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kawasan industri dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Perkembangan kemiskinan suatu daerah di Kabupaten Sidoarjo yang dilihat dari jumlah jiwa yang miskin bertujuan untuk intervensi program agar tepat sasaran. Untuk melihat kinerja daerah dalam menurunkan kemiskinan, perkembangan kemiskinan dapat dilihat dari data angka kemiskinan. Namun demikian, di Sidoarjo menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK), masih terdapat sejumlah kantong kemiskinan tersebar di beberapa kecamatan seperti Kec Tarik, Kec Krembung, Kec Krian, Kec Balongbendo dan Kec Jabon. Sehingga sejumlah program pembangunan diprioritaskan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Penurunan angka kemiskinan di Kab Sidoarjo itu salah satu penyebabnya juga karena ada faktor penurunan angka pengangguran. Di Kabupaten Sidoarjo angka penurunan pengangguran bisa diturunkan, karena masyarakat telah menjadi wirausaha baru yang mandiri, adanya pelatihan – pelatihan kerja berbasis kompetensi dan ada bursa-bursa lowongan kerja dan jenis upaya lain yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD), (Supriyanto, 2019).

Meski pembangunan di Sidoarjo cukup pesat, nyatanya belum merata ke seluruh wilayah. Pembangunan hanya kencang di pusat kota, sementara di desa pinggiran masih belum. Dari data yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, masih ada lima desa yang masuk kategori sangat tertinggal. Kelima desa tersebut berada di empat kecamatan. Yakni Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, serta Desa Kedungbendo dan Desa Penatarsewu di Kecamatan Tanggulangin. Alasannya adalah minimnya partisipasi pembangunan dari masyarakat. Dan pembangunan fisik tidak selalu dikerjakan pemerintah desa. Warga juga bisa ikut turut serta. Seperti membangun lapangan desa dan jalan, Lambertus Hurek (2018).

Salah satu penyebab terjadinya tingkat kemiskinan yaitu tingkat pengangguran juga menimbulkan pengurangan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai oleh seseorang. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah (Yarlina, 2012). Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo (2018) menyatakan angka pengangguran mencapai 53.475 orang. Meningkat menjadi 4,9 persen dibanding tahun lalu yang jumlahnya 52.675 orang pengangguran. Peningkatan tersebut karena angka lulusan sekolah yang terus melonjak setiap tahun dan bertambahnya perpindahan penduduk. Ada hubungan

yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap selalu berada pada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad dalam Probosiwi, 2016).

Di sisi lain, hubungan yang disebabkan oleh lemahnya pengukuran tingkat pengangguran adalah orang yang menganggur dalam keadaan yang baik , sementara orang yang sangat miskin justru tidak menganggur. Hubungan tersebut diperkuat oleh data pada level kabupaten/kota yang menunjukkan kecenderungan yang sama (Probosiwi, 2016).

Disamping itu tingkat tenaga kerja akan berdampak pada kemiskinan, tenaga kerja bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Masalah tenaga kerja tersebut begitu nyata dengan lingkungan, bahkan masalah tenaga kerja dapat menimbulkan masalah baru baik dibidang ekonomi maupun non-ekonomi (Probosiwi, 2016).

Berdasarkan data tenaga kerja tahun 2017, di Kabupaten Sidoarjo terdapat 1.666.227 jiwa penduduk usia kerja atau 76,30 persen terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo (2.183.682 jiwa, proyeksi penduduk tahun 2017). Sebagian besar dari penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja atau aktif dalam kegiatan ekonomi. Kelompok angkatan kerja mencapai 64,54 persen sedangkan bukan angkatan kerja 35,46 persen. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih aktif di pasar tenaga kerja dibandingkan perempuan, hal ini memang secara budaya laki-laki yang bertanggungjawab secara ekonomi di

keluarga, sehingga proporsi laki-laki yang bekerja jauh lebih besar dibanding perempuan. Hubungan tenaga kerja dengan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang dapat memicu kemakmuran masyarakat salah satunya adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sukirno,2004).

Begitu pula dari tingkat inflasi, inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain (Sudarso dalam Susanto dkk, 2017). Di Kabupaten Sidoarjo, inflasi tahun 2012 sebesar 3,93 %. Sementara pada tahun 2015, inflasi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 8,63 % (BPS Kabupaten Sidoarjo). Hubungan dari tingkat inflasi terhadap kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dapat digunakan dengan dua cara yaitu pertama, inflasi mengakibatkan nilai riil dari uang yang dipegang menjadi turun. Ketika harga meningkat, uang untuk membeli lebih sedikit (daya beli menjadi turun). Kedua, inflasi mengakibatkan bunga riil yang diperoleh dari menyimpan uang di bank menjadi turun sehingga daya beli menjadi turun. Turunnya daya beli ini mengakibatkan masyarakat menjadi lebih miskin dari sebelumnya (Fatma, 2005).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan dilaksanakan penelitian yang lebih lanjut mengenai **“Dampak Pengangguran, Tenaga Kerja, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo ?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas diperoleh tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini peneliti memperoleh manfaat yaitu:

1. Manfaat bagi peneliti

Mengetahui dampak pengangguran, tenaga kerja, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Dan selanjutnya untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.

2. Manfaat bagi pembaca

Pembaca dapat mengetahui seberapa besar dampak pengangguran, tenaga kerja, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

3. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Dengan diadakannya penelitian ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengetahui dampak pengangguran, tenaga kerja, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pemerintah dapat mengembangkan potensi yang ada.